



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI V DPR RI**

**(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN SAR NASIONAL, BPLS DAN BPWS)**

| | |
|---------------|---|
| Tahun Sidang | : 2017 – 2018 |
| Masa Sidang | : IV |
| Rapat | : Ke - |
| Jenis Rapat | : Rapat Dengar Pendapat Umum |
| Hari/Tanggal | : Senin, 12 Maret 2018 |
| Sifat | : Terbuka |
| Pukul | : 11.45 WIB s.d 13.00 WIB |
| Tempat | : Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V), Gedung Nusantara DPR RI |
| Acara | : Konsultasi Mengenai Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Teluk Wondama. |
| Ketua Rapat | : Anton Sukartono Suratto |
| Sekretaris | : Dra. Prima MB. Nuwa, M.Si |
| Hadir Anggota | : dari 50 orang Anggota Komisi V DPR RI |
| Hadir Mitra | : Bupati Teluk Wondama beserta jajaran |

CATATAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat dibuka pada pukul 11.45 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi V DPR RI dengan Bupati Teluk Wondama pada hari ini adalah terkait konsultasi mengenai pembangunan infrastruktur Kabupaten Teluk Wondama.
3. Ketua Rapat mempersilakan kepada Bupati Teluk Wondama untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya.
4. Ketua Rapat mempersilakan kepada Anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan pertanyaan dan tanggapan.

II. CATATAN RAPAT..../Hal.2

II. CATATAN RAPAT:

- A. Secara geografis dan geostrategis kabupaten Teluk Wondama memiliki peran penting dalam pembangunan jasa lingkungan sebab 2/3 wilayahnya merupakan Taman Nasional laut Teluk Cendrawasi dengan luas 1.453.500 Ha, dengan jumlah penduduk sebanyak 50.000 jiwa yang 36,37% penduduk masih berada di bawah garis kemiskinan serta tingkat Indeks Pembangunan Manusia yang hanya mencapai 57,16 sehingga tergolong daerah tertinggal di Papua Barat.
- B. Bukan hanya masalah ketimpangan social, Kabupaten Teluk Wondama juga di perhadapkan dengan ketimpangan wilayah yang disebabkan oleh minimnya distribusi pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dalam menghubungkan kawasan terisolir pegunungan, pesisir dan pulau-pulau. Dari kondisi yang memprihatinkan ini menjadi dasar bahwa ada beberapa bidang pembangunan yang menjadi perhatian kita bersama:
1. Bidang Pekerjaan Umum;
 - a. Pembangunan jalan strategis dan jalan nasional;
 - Perlu Pembangunan Dan Peningkatan Jalan Rute Wondama-Kaimana, Wondama-Teluk Bintuni, Wondama-Manokwari Selatan Dan Wondama-Nabire.
 - b. Pembangunan jalan kabupaten;
 - Jalan Kerikil = 72,28 Km
 - Jalan Tanah = 25,34 Km
 - Perlu Peningkatan Jalan Antara Ibukota Kabupaten dengan Beberapa Distrik-Distrik
 - c. Pembangunan rumah rakyat yang layak huni
 - d. Pembangunan jembatan;
 - Jembatan kali Aisandami
 - Jembatan kali Ramip
 - Jembatan kali Rowor
 - Jembatan kali Wandamui
 - Jembatan kali Rado
 - Jembatan Kali Sanduay
 - Jembatan Kali Anggris
 - Jembatan Kali Manggurai
 - Jembatan kali Wanayo
 - Jembatan kali Kabow
 - Jembatan Kali Ati
 - Jembatan Kali Rowi
 2. Bidang Perhubungan ;
 - a. Pembangunan infrastruktur transportasi darat
 - Rute Manokwari Selatan –Teluk Wondama
 - Rute Teluk Bintuni-Teluk Wondama
 - Rute Nabire-Teluk Wondama
 - Rute Ibukota Kabupaten Ke Distrik-Distrik Belum Terhubung Secara Baik
 - Perlu Penyediaan Sarana Transportasi Darat Berupa Damri
 - b. Pembangunan bandara;
 - Arc 1b Tipikal Cessna C-208 Grand Caravan Beroperasi 4 Kali Dalam Seminggu, Rute Manokwari-Wasior.
 - c. Pembangunan infrastruktur laut yang terdiri dari dermaga dan tambatan perahu;
 - Kapal Pelni Satu Bulan 2 Kali
 - Kapal Asdp 1 Minggu Sekali
 - Kapal Bahari Express 1 Minggu 2 Kali
 - Kapal Margaret 1 Minggu 2
 - Ada 5 Ibukota Distrik Di Kawasan Kspn Yang Belum Memiliki Dermaga
 - Masih Banyak Kampung Di Wilayah Pesisir Dan Pulau (Kspn) Belum Memiliki Tambatan Perahu
 - Tidak Ada Akses Untuk Menjangkau Zona Inti Kspn Tntc Kepulauan Auri
 3. Bidang Pembangunan daerah Tertinggal, Desa dan Transmigrasi.
 - a. Pembangunan jalan non status
 - b. Pengembangan kawasan transmigrasi yaitu rumah, jalan, air bersih, dan pasar
- C. Dalam rangka pembenahan infrastruktur dan transportasi di kabupaten Teluk Wondama, Pemerintah daerah meminta Komisi V DPR RI yang membidangi Infrastruktur dan Transportasi untuk melakukan kunjungan spesifik ke kabupaten Teluk Wondama.

D. Ketua Rapat menyampaikan beberapa hal diantaranya yakni:

1. Komisi V akan memperjuangkan usulan Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama di bidang infrastruktur jalan kabupaten dan jalan non status, pengembangan pelabuhan, pembangunan bandara, demi kesejahteraan masyarakat.
2. Komisi V meminta kepada Pemerintah daerah Kabupaten Teluk Wondama untuk segera menyiapkan dokumen usulan bentuk program dan kegiatan terkait pembangunan infrastruktur dan transportasi di kabupaten Teluk Wondama untuk di tindaklanjuti dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama mitra.
3. Terkait usulan pembangunan infrastruktur, Komisi V meminta Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama untuk terus berkoordinasi dengan Kementerian PUPR dan Perhubungan serta Kementerian Daerah Tertinggal, Desa dan Transmigrasi agar memperhatikan seluruh kebutuhan infrastruktur dan transportasi di Kabupaten Teluk Wondama.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.00 WIB.

Jakarta, 12 Maret 2018

KETUA RAPAT

ttd

ANTON SUKARTONO SURATTO